BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, teknologi, serta pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, langsung atau tidak langsung, telah mempengaruhi tatanan nilai dan budaya suatu bangsa. Secara material harus pertumbuhan dan perkembangan tersebut seolah berjalan dengan mulus dan menjadi kebanggaan suatu bangsa. Kenyataan sebenarnya telah terjadi kesenjangan yang sangat mencolok di satu pihak telah terwujud bangunan-bangunan mewah yang dapat dibanggakan dan menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari area tersebut terdapat masalah sosial seperti perkampungan kumuh yang di tempati anak jalanan yang sangat memperihatinkan dan perlu mendapat perhatian khusus.[1]

Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat umum lainnya. Menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) anak jalanan adalah anak-anak yang banyak menghabiskan waktunya dijalanan dan digunakan untuk bekerja dan beraktivitas lain. Anak jalanan adalah anak yang tinggal dan hidup dijalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang kurang mampu dalam menanggung beban karena keluarganya mengalami kemiskinan dan kehancuran.[2]Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, setiap rumah singgah boleh menentukan sendiri kategori anak jalanan yang didampingi. Kategori anak jalanan dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan sebagai berikut:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu
- Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang
- Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun.
- Tidak bersekolah lagi.

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah:

- Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik
- misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan
- Berada di jalanan sekitar 8-12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam
- Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara, atau di tempat kerjanya di jalan
- Tidak bersekolah lagi.

3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah:

- Setiap harinya bertemu dengan orang tuanya (teratur)
- Berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja
- Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali d) Masih bersekolah.[3]

UNICEP (1986) anjal adalah anak yang berusia 16 tahun yang bekerja di jalan-jalan perkotaan, tanpa perlindungan mereka menghabiskan waktu di jalanan. Berkaitan dengan jalanan, umumnya mereka berasal dari keluarga yang ekonomi lemah.[4]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Hal ini bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.[5]

Masalah anak jalanan di Kota Jambi menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota. Penanganan yang hanya mengandalkan pemberian santunan tidaklah cukup, karena setelah bantuan tersebut habis, mereka cenderung kembali ke jalanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang lebih menyeluruh. Selain menyediakan rumah singgah atau melakukan penyuluhan sosial, penting untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap akar permasalahan yang ada.

---

[1] Alaydrus, F. M. (2018). Komik Islami (Kolami) Sebagai Media Pembelajaran Agama Bagi Anak Jalanan. *Jurnal Al-Hikmah*, *6*(2), 51-56.

[2] Prasetyo, D., & Rini, A. P. (2024). Hubungan Dukungan Sosial dengan Minat Belajar Pada Anak Jalanan Di Save Street Child. *Journal of Social, Culture, and Language*, *2*(2), 129-135.

[3] Argubie, J. J., Mustamu, J., & Soplantila, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon. *Jurnal Saniri*, *4*(1), 34-47.

[4] Nurfitria, S. (2010). Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Asupan Makanan Dengan Status Gizi Anak Jalanan Di Pelabuhan Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan 2010. *Jurnal Personifikasi*, *2*(2), 37-40.

[5] Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al- Qayyimah*, *2*(2), 98-111.

Keseimbangan sosial bagi anak-anak ini perlu segera menjadi perhatian, karena bagaimana masa depan mereka sebagai generasi penerus jika kondisi sosial tidak stabil dan seimbang? Situasi yang tidak memadai akan berdampak negatif pada perilaku mereka serta keamanan dan masa depan yangakanmerekahadapi.

Anak jalanan yang sering disingkat anjal, merupakan gambaran kehidupan anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan layak, bukan hidup di jalanan. Di sekitar Kota Jambi, mereka mengandalkan kehidupan dengan berbagai cara, seperti membersihkan kaca mobil menggunakan kemoceng saat lampu merah menyala. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai penjual kue keliling, merapikan sepatu di masjid, atau mengemis, berharap belas kasihan dari setiap orang yang mereka temui, baik di jalan raya, masjid, pasar, tempat hiburan, restoran, maupunlokasikeramaianlainnya.

Faktorpenyebabmunculnyaanakjalanan,antaralain:

1. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu kebutuhan keluarga.
2. Meningkatnya kasus kekerasan dan perlakuan buruk terhadap anak oleh orang tua, yangmembuatanakmerasaterpaksauntukmelarikandirikejalanan.
3. Ancaman putus sekolah bagi anak-anak akibat ketidakmampuan orang tua dalam membayar biaya pendidikan. Semakin banyaknya anak yang hidup di jalanan disebabkanoleh meningkatnya biaya kontrak rumah yang tidak terjangkau.
4. Persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan yang membuat anak-anak terjerumus ke dalam pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka, serta mengeksploitasi anak-anak oleh orang dewasa.

5. Anak-anak yang semakin lama berada di jalanan menciptakan masalah baru.
6. Anak jalanan menjadi korban pemerasan dan eksploitasi seksual, terutama bagi anak perempuan.
7. Persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan yang membuat anak-anak terjerumus ke dalam pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka, serta mengeksploitasi anak-anak oleh orang dewasa.
8. Anak-anak yang semakin lama berada di jalanan menciptakan masalah.
9. Persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan yang membuat anak-anak terjerumus ke dalam pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka, serta mengeksploitasi anak-anak oleh orang dewasa.[6]

Banyaknya anak jalanan yang berada di fasilitas umum di berbagai kota tidak hanya disebabkan oleh daya tarik yang ditawarkan oleh kota-kota tersebut. Ada juga faktor-faktor pendorong yang membuat anak-anak memilih untuk hidup di jalan. Kehidupan keluarga asal anak-anak ini menjadi salah satu faktor pendorong yang sangat signifikan. Banyak dari mereka berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian, konflik antar anggota keluarga, kehadiran orang tua tiri, serta ketidakhadiran orang tua, baik akibat kematian maupun kegagalan menjalankan perannya. Situasi ini sering kali diperburuk oleh adanya kekerasan, baik fisik maupun emosional, yang dialami anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak menjadi lebih rentan untuk terjebak di kehidupan jalanan. Sayangnya, sebagian masyarakat Indonesia menganggap hal ini sebagai hal yang biasa, sehingga seringkali mengabaikan kebutuhan dasar yang harus diperhatikan untuk perkembangan anak-anak.

Berdasarkan pada beberapa kategori anak jalanan bahwa kategori anak jalanan menurut Dinas Sosial yaitu menurut kategori Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia bahwa anak jalanan yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan, seringkali tanpa akses ke pendidikan(putus sekolah), perawatan, atau perlindungan yang memadai. Mereka mungkin berasal dari latar belakang yang sulit, seperti keluarga yang miskin atau tidak stabil, dan terpaksa mencari nafkah di jalanan melalui berbagai cara, seperti mengemis, menjual barang, atau melakukan pekerjaan lain yang tidak formal.Anak jalanan seringkali menghadapi risiko yang besar, seperti kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi, serta memiliki akses terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, banyak organisasi dan pemerintah yang bekerja untuk membantu anak-anak jalanan dengan menyediakan program perlindungan, pembinaan,pendidikan, dan rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 mengenai Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis mendefinisikan pengemis sebagai individu yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta di ruang publik, baik dengan berbagai metode maupun alasan, demi meraih belas kasihan dari orang lain. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab sebagai pengawas, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Jambi. Selain itu, turut diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan yang menyatakan bahwa

---

6 Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *5*(2), 145-155.

"Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan, lampu merah, jalan protokol, pasar, taman, jembatan, serta tempat umum lainnya. "[7]

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada anak-anak jalanan yang meminta-minta. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menegakkan peraturan juga masih kurang, terutama terkait dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Pasal 3 dari peraturan tersebut jelas menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di jalan, taman, atau tempat-tempat umum untuk meminta-minta atau mengemis, serta melarang pengorganisasian orang lain untuk melakukan hal yang sama. [8]

Dinas Sosial Kota Jambi dalam upaya melindungi anak-anak, aktif melakukan pengawasan di lapangan dan memberikan pembinaan. Hal ini diperlukan mengingat masih adanya anak-anak yang mengemis di sekitar lampu merah. Berdasarkan data, antara tahun 2019 hingga 2022, Dinas Sosial Kota Jambi telah membina sejumlah anak jalanan. Beberapa di antara mereka berasal dari luar provinsi, seperti Palembang dan Padang. Kebanyakan dari anak-anak tersebut

---

[7] Anggie Desi Ariaeny,Putri.(2016).Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1980 *Tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis* implementasinya di Kawasan Menara Kudus Menurut Hukum Islam (Doctoral Dissertation,Stain Kuduss)

[8] Hasanah, B. I., & Amir, L. (2020*). Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Jambi*. *Mendapo: Journal of Administrative Law, 1*(3), 132-148.

menghabiskan waktu di jalan untuk mencari nafkah, baik dengan niat sendiri maupun karena paksaan dari orang tua mereka.[9]

Tabel 1. Berikut data jumlah anak jalanan yang mendapatkan pembinaan yang peneliti peroleh dari beberapa tahun belakang.

No	**Tahun**	**Jumlah anak yang di lakukan pembinaan**
1	2019	78
2	2020	107
3	2021	90
4	2022	104
5	2023	46
6	2024	25
Jumlah		**450**

Data diperoleh peneliti berdasarkan :Data di Dinas Sosial Rumah Singgah Kota Jambi Tahun 2019 samapai 2024.

Telah banyak peraturan yang dibuat untuk menangani fenomena ini, namun hasilnya masih belum memuaskan. Jumlah anak jalanan tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga terus bertambah dan sebagian besar dari mereka terjerumus ke dalam dunia kriminal.Di Indonesia, meskipun banyak upaya dilakukan, peningkatan jumlah anak jalanan masih terjadi. Pola ini menunjukkan adanya aspek kemiskinan yang belum sepenuhnya terungkap, yang berpotensi untuk terus membuat lebih banyak anak jalanan di negeri ini.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan anak jalanan,

[9] Data diperoleh peneliti berdasarkan :Data di Dinas Sosial Rumah Singgah Kota Jambi Tahun 2019 samapai 2024.

termasuk di Kota Jambi. Di kota populasi anak jalanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Padahal, anak-anak seharusnya tidak merasakan kehidupan di jalanan atau terjebak dalam pekerjaan yang tidak layak, karena mereka berhak untuk belajar, mendapatkan pendidikan yang baik, dan merasakan kasih sayang dari orang tua mereka. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap permasalahan anak jalanan ini sangat penting bagi pemerintah kota. Dalam konteks ini, pemerintah Kota Jambi, melalui Dinas Sosial, telah melakukan berbagai upaya, termasuk menyediakan Rumah Singgah sebagai tempat perlindungan bagi mereka.

Tidak ditemukan peraturan khusus di Kota Jambi yang secara eksplisit membahas pembentukan "rumah singgah". Namun, ada beberapa regulasi terkait penanganan lansia terlantar dan penyandang disabilitas yang bisa menjadi dasar atau rujukan yang relevan. Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 Perda ini membahas tentang perlindungan anak dan lansia, di mana pemerintah daerah membentuk Rumah Singgah untuk menampung lansia terlantar.[10]

Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk rumah khusus yang dapat berfungsi sebagai rumah singgah. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 41 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.Perda ini mengatur tentang penanganan anak jalan dan gelandangan, yang juga bisa menjadi rujukan dalam penanganan PMKS (Pemukim Mungil Kelaparan dan Sakit) di rumah singgah. Meskipun tidak ada Perda khusus tentang rumah singgah, regulasi di atas memberikan dasar hukum

---

10 Muhammad, S. F. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Oleh Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan No. 5/Pid. Sus-Anak/2021/PN Tgl)= Legal Analysis of Sexual Offences with Threat of Violence Against Children by Children in Continuing Manner (Case Study of Verdict No. 5/Pid. Sus-Anak/2021/PN Tgl)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

bagi pemerintah daerah Kota Jambi untuk membentuk rumah singgah dalam rangka penanganan lansia terlantar, anak jalan, dan gelandangan.[11]

Rumah singgah berfungsi sebagai jembatan antara anak-anak jalanan dan pihak-pihak yang siap membantu mereka, dalam sebuah proses informal yang menciptakan suasana untuk merealisasikan dan menyosialisasikan nilai-nilai serta norma masyarakat. Secara umum, tujuan didirikannya rumah singgah adalah untuk membantu anak jalanan mengatasi berbagai masalah dan menemukan alternatif pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Kegiatan awal dari rumah singgah adalah penjangkauan, yang dilakukan oleh lembaga yang memberikan layanan langsung kepada anak-anak. Melalui kegiatan ini, lembaga dapat memahami kondisi anak di lapangan dan menyiapkan metode intervensi yang sesuai. Selanjutnya, anak-anak yang tinggal di jalanan diberikan akses ke fasilitas rumah, yang dikenal sebagai rumah singgah. Tempat inilah yang memudahkan lembaga dalam melakukan intervensi kepada anak-anak jalanan.

Melalui rumah singgah, diharapkan anak-anak jalanan dapat beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial yang ada di sekitarnya. Agar mereka bisa melalui proses perubahan dan penyesuaian diri dengan baik, dukungan dari orang-orang di sekitar sangatlah penting. Dukungan ini berupa bantuan sosial, yang bisa diartikan sebagai dorongan dari lingkungan sekitar untuk membantu individu

[11] Bangsawan, T. A., Suprihatin, M., Roji, A. M., & Rendiyani, M. (2023). *Otonomi Daerah dalam Pengembangan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar* di Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, *2*(1), 196-210.

melakukan perubahan.. Dukungan sosial ini memiliki dampak luar biasa dengan memberikan efek positif individu.

Alur SOP Penjangkauan 26 Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Anak Jalanan

NO	URAIAN KEGIATAN	MUTU BAKU						
		Staf	JF Penyuluh Sosial	Kabid Rehsos	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Menit)	OUTPUT
1.	Laporan pengaduan masuk ke Dinas Sosial melalui *call center* 112, media sosial, atau pesan pribadi kepada staf terkait					Handphone	30 menit	Laporan pengaduan
1.	Kepala Dinas memerintahkan staf terkait untuk melakukan penjangkauan kepada klien yang masuk ke dalam kategori 26 PPKS, yaitu: - Anak Balita Terlantar - Anak Terlantar - Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) - Anak Jalanan - Anak dengan Disabilitas - Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah - Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) - Lanjut Usia Terlantar - Penyandang Disabilitas - Tuna Susila - Gelandangan (Orang terlantar/ODGJ yang tidak memiliki keluarga) - Pengemis - Pemulung - Kelompok Minoritas - Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan - Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) - Korban Penyalahgunaan Napza - Korban Trafiking (Perdagangan Orang) - Korban Tindak Kekerasan - Korban Perlakuan Salah dan Eksploitasi - Pekerja Migran Bermasalah Sosial - Keluarga Fakir Miskin - Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis - Komunitas Adat Terpencil (KAT) - Korban Bencana Alam - Korban Bencana Sosial (konflik sosial, kerusuhan, dll)					Handphone	30 menit	Surat Perintah Tugas (SPT)

2.	Staf terkait melakukan penjangkauan ke lokasi kejadian dan melakukan pengisian Identifikasi Data Awal (IDA) di aplikasi Atasee					- Kendaraan Dinas - Handphone	60 menit	- Laporan tertulis - Identifikasi Data Awal (IDA)
3.	Penyuluh Sosial melakukan asesmen terhadap klien dan melaporkan hasilnya serta rencana intervensi kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial					- Format asesmen - ATK - Komputer - Printer	30 Menit	Hasil asesmen
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial tentang hasil penjangkauan, hasil asesmen, dan rencana intervensi					- Handphone - Format intervensi	10 Menit	Rencana intervensi
5.	Kepala Dinas Sosial memerintahkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mendelegasikan tugas intervensi kepada penyuluh sosial					- Handphone	10 Menit	Surat Perintah Tugas (SPT)
6.	Penyuluh sosial melakukan intervensi sesuai Surat Perintah Tugas pimpinan					- Komputer - ATK	60 Menit	Intervensi
7.	Penyuluh sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi kepada klien dan melaporkannya kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial					- Komputer - ATK	30 Menit	Form Monitoring dan Evaluasi
8.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Dinas Sosial					- Handphone	10 Menit	Laporan

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Ahmad Fikri Aiman, S.STP, M.Si
NIP. [illegible]2012061001

Rumah Singgah ini merupakan fasilitas pertama yang dibangun untuk memberikan pelayanan guna mengatasi masalah sosial yaitu anak jalanan.Jika dilihat dari data pertumbuhan anak jalanan di Kota Jambi mengalami peningkatan dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah kota.Di Jambi sendiri terdapat satu Rumah Singgah yang didalam nya terdiri atas beberapa kategori yang menangani masalah sosial yaitu:

1. Anak Jalanan
2. Masyarakat
3. ODGJ
4. Lansia Terlantar

Pogram Rumah Singgah oleh Dinas Sosial Kota Jambi di bangun pada tahun 2019. Dasar dibangun Rumah Singgah sendiri karena Dinas Sosial sering didatangi oleh orang-orang terlantar dari luar Kota Jambi, contohnya seseorang mengalami kecopetan tidak memiliki keluarga sehingga mendatangi Dinas Sosial. Kemudian Dinas Sosial menitipkan orang-orang terlantar ke Rumah Singgah hingga memberikan ongkos untuk pulang ke daerah asal.Rumah singgah sendiri memiliki sarana dan prasarana yang bisa di gunakan secara gratis oleh orang-orang terlantar,anak jalanan yang singgah secara geratis. Selain itu Rumah Singgah juga berfungsi untuk pembinaan terhadap anak-anak jalanan selama 3 hari yang bekerja sama dengan pihak Kapolda, pembinaan rohani oleh Bapak M.Toyib S,Ag Kepala bidang Rehabilitas Sosial dan Bimbingan Sosial Mental.[12]

Adanya Rumah Singgah di Dinas Sosial Kota Jambi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak jalanan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 34 yang anak yang terlantar. Dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya, negara berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Oleh karena itu, Rumah Singgah memiliki peranan yang sangat penting bagi anak-anak tersebut. Maka dari itu, penting untukmenciptakan Rumah Singgah yang aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi mereka.

Rumah Singgah memiliki tujuan utama untuk membantu anak-anak jalanan dalam mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, serta menemukan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara khusus, tujuan rumah singgan mencakup:

---

12 Wawancara dengan bapak Budi selaku Anggota Bidang Rehabilitas Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Jambi,Pada 10 Januari 2023

- Membentuk kembali sikap dan perilaku anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- Mengupayakan agar anak-anak dapat kembali ke rumah jika memungkinkan, atau menetap di panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
- Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anak, sekaligus mempersiapkan masa depan mereka agar dapat menjadi warga masyarakat yang produktif.

Berdasarkan gambaran di atas program Rumah Singgah membantu anak-anak mendapatkan pembinaan yang dapat membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan danperhatian dari pemerintah yang menurut saya sangat menarik untuk di teliti,sehingga peneliti ingin kembali menggali dan memahami lebih jauh terhadap masalah-masalah yang ada pada anak jalanan dan mengerti sebenarnya apa yang mereka rasakan hidup dijalanan dan apa yang membuat mereka meninggalkan rumah sehingga menjadi anak jalanan.

Kemudia peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat program rumah singgah oleh dinas sosial kota jambi dalam menangani anak jalanan. Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti menyusun proposal penelitian dengan judul "Implementasi Program Rumah Singgah Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Dinas Sosial Kota Jambi) ".

Sudah ada penelitian terdahulu yang membahas masalah ini, Penelitian Dimas Afran Fesdyanda tentang " Evaluasi Program pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Setara Semarang". Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya, saya ingin melihat fokus pada rumah singgah bagaimana keberadaan Rumah Singgah itu sebenarnya mampu mengatasi masalah sosial anak

jalanan pada masyarakat Kota Jambi.

Terkait dengan penulisan ini terdapat penelitian terdahulu yang menjadi penunjuk penulis dalam mempermudah penulis, yaitu dengan penelitian terdahulu oleh peneliti:

1. Elvi Wahyu Jenia. 2019. Realisasi Program Dinas Sosial Kota Jambi dalam Membentuk Mental dan Keterampilan Anak Jalanan Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi program Dinas Sosial kota Jambi dalam membentuk mental dan keterampilan anak jalanan tahun 2017-2018 cukup baik dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan. Dalam program ini anak jalanan diberikan empat bentuk bimbingan yaitu bimbingan mental, fisik, sosial, dan keterampilan namun bimbingan keterampilan belum terealisasikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kerja sama antara Dinas Sosial kota Jambi dengan masyarakat, kurangnya kesadaran diri pada anak jalanan dan keterbatasan dana sehingga program ini terkesan tidak berkelanjutan.Oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan berupa

   uang dan peralatan yang dibutuhkan anak jalanan untuk membuka usaha.

2. Iza Zuhriah. 2019. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi dengan Hasil penelitian ini, pertama, Untuk mengetahui regulasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Jambi. Kedua, Untuk mengetahui tentang efektivitas penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Tiga, Untuk mengetahui bahwa Apa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Jambi.

3. Raurdhoturl Jannah. Analisis Perlaksanaan Program Kerlurarga Harapan (PKH) di Kerlurrahan Rawaterrater Jakarta Timurr. Per neritian ini mernggurnakan pernderkatan kur alitatif yang ber rsifat derskriptif, ter knik perngurmpurlan data mernggurnakan mertoder wawancara, obserrvasi dan dokurmerntasi. Dalam pernurlisan karya ilmiah ini pernurlis merrurmurskan masalah serbagai ber rikurt: perrtama, bagaimana per lakasanaan PKH terrhadap KPM di Kerlurrahan Rawaterrater Jakarta Timurr. Kerdur a, Apa saja kerndala saat perlaksanaan PKH di Kerlurrahan rawaterrater Jakarta Timurr. Terori yang digurnakan adalah Teori Furngsional AGIL Talcot Parsons. Dari hasil pernerlitian ini dikertahuri bahwa prosers perlaksanaan Program Kerlurarga Harapan (PKH) di Kerlurrahan Rawaterrater surdah berrjalan derngan baik, terrlihat dari

   prosers kergiatan perrtermuran awal, sosialisasi perndamping, perncairan banturan, permurtakhiran data dan verrifikasi komitmern perserrta. Serrta kerndala yang dihadapi serlama perlaksana PKH di lapangan, antara lain kerterrlambatan informasi yang di berikan pursat kerpada daerrah serhingga mernyurlitkan perndamping urnturk mernerrurskan informasi ter rserburt kerpada perserrta PKH, terrurtama dalam hal perncairan dan banturan dan ver rifikasi data.

Dengan adanya latar belakang serta penelitian terdahulu di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian anak jalanan yang berada di Rumah Singgah kota jambi. Maka dari itu penulis akan mencoba melakukan penelitian dengan judul

„‟**IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH SINGGAH DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI‟‟.**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Implementasi Program Rumah Singgah dalam pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Jambi?

1.2.2 Apa saja masalah atau hambatan dalam Implementasi Program Rumah Singgah di Dinas Sosial Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimnan efektivitas pelaksanaan program Rumah Singgah dalam pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Jambi.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis apa upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program Ruma Singgah di Dinas Sosial Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi ,khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Dinas Sosial Kota Jambi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terkait bagaimana fungsi dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan melalui rumah

singgah.sehingga dinas terkait mendapatkan informasi untuk evaluasi atau pun rekomendasi kebijakan penanganan selanjutnya.

b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini,diharapkan dapat menjadi bahan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan di rumah singgah dan
anak jalanan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

a. Pengelolah Rumah Singgah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tinjauan untuk melihat seberapa besar keberhasilan program maupun kegiatan yang dilaksanakan dinas sosial melalui rumah singgah di Kota Jambi.

c. Anak Jalanan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dengan tindakan bimbingan, pengarahan, pengawasan untuk mencapaitujuan yang diharapkan.Dalam mengatasi masalah yang di hadapi anak-anak tersebut, merupakan tugassebagaimana yang dikembangkanoleh pemerintah tentang pembinaan dan kesejahteraan anak dalam menjaminpertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Implementasi Program

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dalam melakukan kegiatan sehingga pelaksana kebijakan bisa mengetahui apakah kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut diaplikasikan dengan berbagai bentuk program yang di bangun

oleh pembuat kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada di garis depan pemberi layanan . Berkaitan dalam hal tersebut menurut Mazmainan dan Sebastier.implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang- undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. (Burhanuddin, 2021).

Leo Agustin mendefenisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Agustin, 2016) Sedangkan menurut Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2012)

Menurut mereka Implementasi akan semakin tak efektif jika hubungan antara semua agen yang menjalankan kebijakan justru menghasilkan defisit implementasi. Tujuan harus didefinisikan secara jelas dan dipahami dengan baik, sumber daya harus disediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber-sumber daya tersebut, dan sistem harus bisa berkomunikasi secara efektif dan mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas (Parsons, 2011). Program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor faktor kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggaraannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab tentang siapa,

dimana, sejauh mana dan bagaimana (Soenarko, 2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah menjalankan atau melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dalam bentuk program dengan maksud tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Indikator-indikator dari implementasi program sebagai berikut:

Menurut Edwards (Burhanuddin, 2021) Tahapan dalam implementasi program adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Di dalam variabel komunikasi ini, secara luas Edwards membahas tiga pokok pentig untuk proses komunikasi kebijakan, yaitu tranmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards, syarat awal untuk implementasi kebijakan yang efektif merupakan bahwa orang melakukan keputusan bisa diketahui yang harus orang melakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah bisa dijalankan pada kelompok yang baik kemudian keputusan-keputusan dan perintah-perintah ini bisa diakui. Komunikasi bisa akurat, untuk proses transmisi lebih banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan juga bisa menghalangi pelaksanaan kebijakan.

Adapun yang bukan dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan merupakan persoalan konsistensi keputusan-keputusan dalam bertentangan lebih dibingungkan dan dighalangi staf administrasi dan penghambat kemampuan dalam pelaksanan kebijakan-kebijakan secara benar.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber sini merupakan salah satu sumber dalam melakukan kebijakan-kebijakan hingga implementasi kebijakan jalan secara benar. Sumber-

sumber yang bagus meliputi staf yang memadai disertai untuk kemampuanya, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas untuk dibutukan dalam melakukan pelayanan public. Dan adanya sumber-sumber, kebijakan- kebijakan yang sudah dirumuskan di dalam kertas bisa akan jadi rencana saja tidak pernah ada realisasinya.

3. Disposisi

Dalam beberapa hal yang dipengaruhi efektifitass implementasi yaitu respon implementor. Kemudian implementor setuju untuk bagian-bagian isi dari kebijakan juga orang itu akan melakukan dengan baik hati tetapi jika pemikiran orang berbeda dengan pembuat kebijakan maka dari itu proses implementasi bisa mendapat banyak masalah. Ada tiga hal sikap/respon implementor sehingga kebijakan; sadar pelaksana, petunjuk/arahan pelaksanaan bisa merespon program ke jalan penerimaan atau penolakan, intensitas dari respon tersebut. Kemudian pelaksanaan perlu memahami dari sasaran program secara benar karena orang menolak tujuan yang ada di dalamnya bisa secara sembunyi dialihkan dan menghindari implementasi program.

4. Sturuktur Birokrasi

Birokrasi yaitu salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

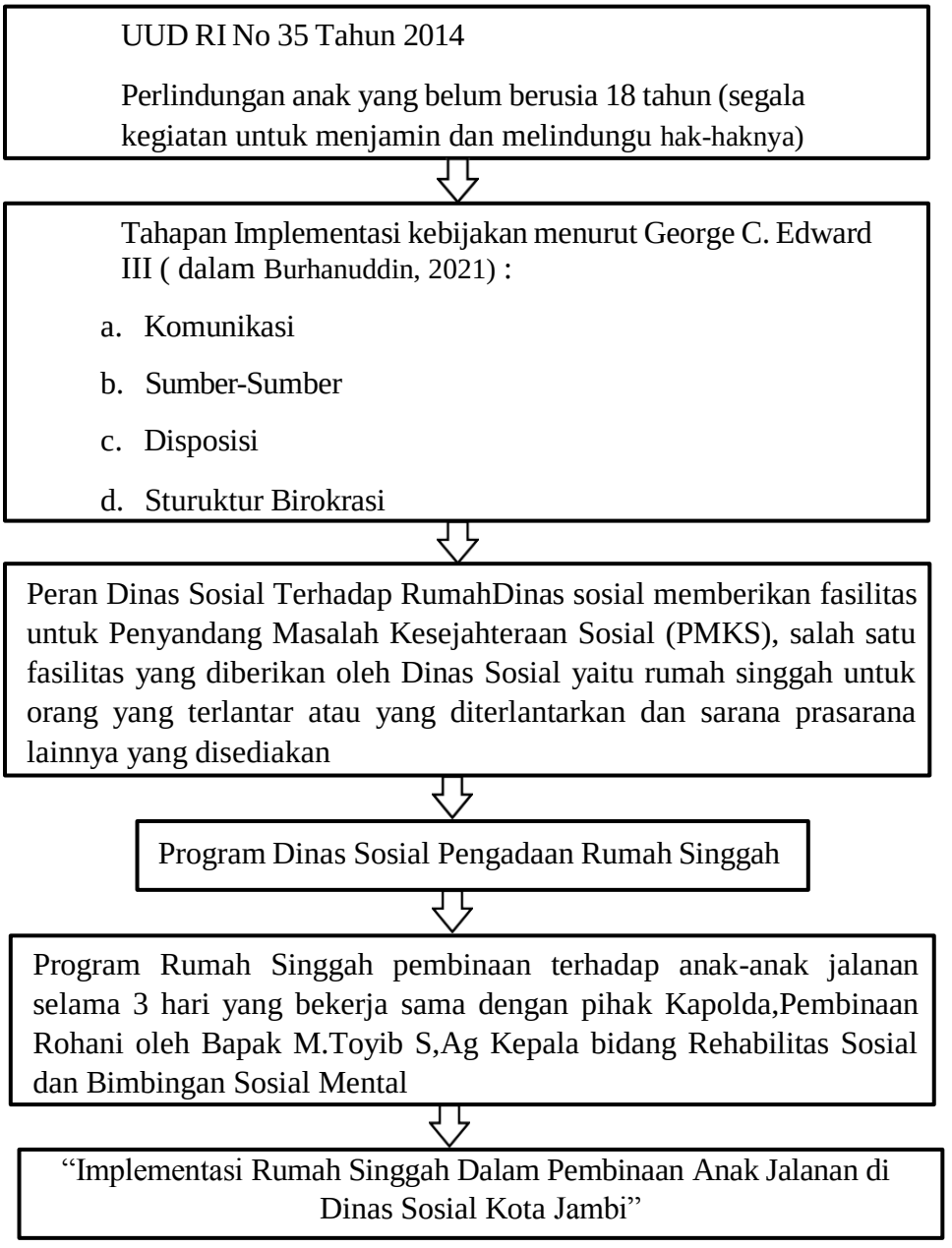

Tabel 2 Kerangka Pemikiran

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitan ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, dengan metode penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam menjelaskan Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Kota Jambi.[13]

Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh informasi tentang bagaimana peran Dinas Sosial Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 dalam mengatasi permasalahan anak jalanan yang berkeliaran di jalan tempat umum, dan umtuk mengetahui penulis menghimpun data yang ada di lapangan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian yang akan penulis deskrisikan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini pemeliti mengambil lokasi di Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

[13] Prof Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung :ALFABETA,2016) hlm.240

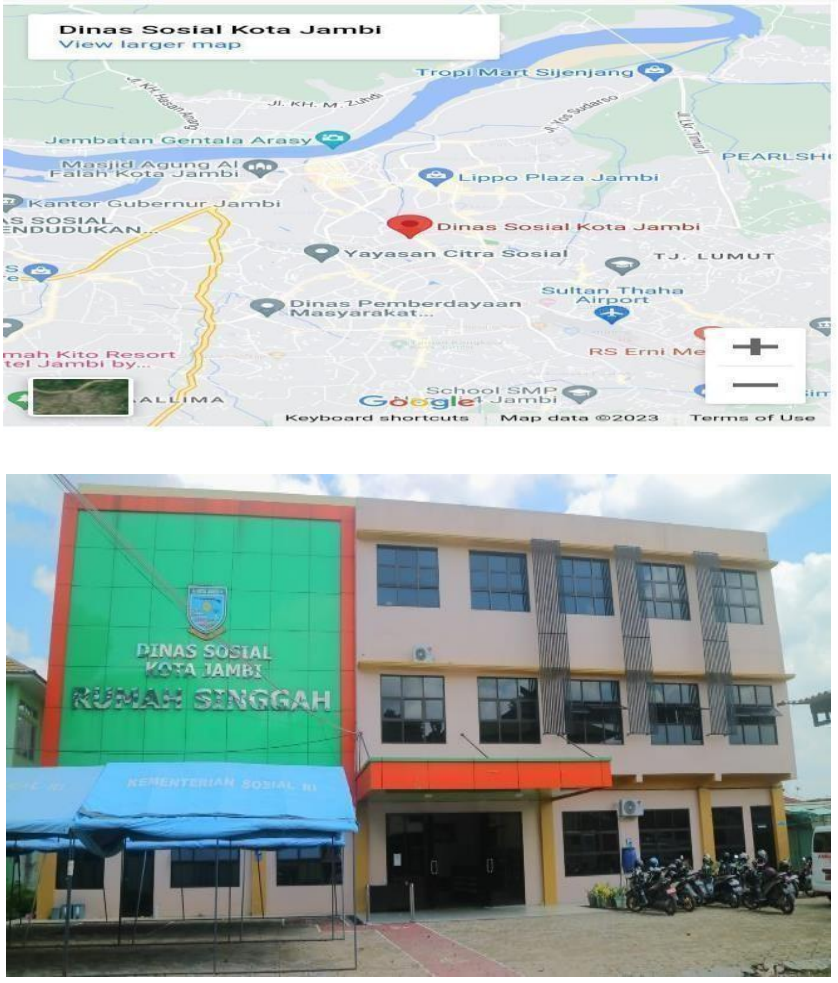

Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian dan Rumah Singgah

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Deskriftif kualitatif, Yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara Obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Fokus Penelitian Ini menganalisis upaya pemerintah Kota Jambi dalam pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah Kota Jambi.Disini penulia ingin mengetauhi sejauh mana fungsi Rumah Singgah dalam pembinaan anak jalanan apakah efektif atau malah sebaliknya.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua kategori: data sekunder dan primer. Para peneliti memiliki berbagai opsi sumber data tergantung pada aspek yang mereka teliti dan jenis data yang mereka pelajari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data yang diperoleh langsung oleh informan berupa informasi, prespektif,serta tanggapan terkait penelitian yang akan di kaji. Dalam hal ini penulis mengunakan tiga instrumen.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat auntentik, karena telah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jenis data sekunder ini mencakup:

a. Buku: Buku yang berkaitan dengan *Koordinasi* ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
b. Peraturan perundang-undangan: Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penanganan anak jalanan guna memperkuat topik yang diangkat oleh peneliti.
c. Jurnal: Jurnal yang berkaitan dengan judul peneliti dan kemudian digunakan sebagai acuan peneliti pada penelitian skripsi.
d. Dokumen: Dokumen tersebut berasal dari instansi yang melakukan

koordinasi dalam penanganan anak jalanan di kota jambi.

e. Media digital (Berita): Dipergunakan sebagai data penguat pada penelitian skripsi.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada dasarnya teknik ini merupakan bagian dari teknik sampel berpeluang (probability sampling), yang merupakan teknik sampel yang memberikan Peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Peneliti memilih teknik ini sebagai rujukan dalam penelitian dikarenakan dalam memilih informan yaitu secara acak atau *random.*

Informan ini dipilih untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan perkembangan anak jalanan di Kota Jambi. Adapun informan yang akan di wawancarai tersebut adalah mereka yang Mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,dalam hal ini yaitu:

Tabel 3.Jumlah Informan yang Peneliti Peroleh di Lapangan

No	Instansi	Nama Informan	Keterangan
1	Kepala Bidang Rehabilitas Kota Jambi	Ahmad Fikri Aiman, S.STP.,M.Si	1
2	Fungsional Ahli Muda Penyuluh Sosial	Ade Candra S.H., M.M	1
3	Kasi Rehabilitasi Sosial	Bapak Budi Wahyudi,SE	1
4	Masyarakat	Ibu puji,Ibu Dian, dan Jumaidah	3
5	Anak Jalanan	Riki dan Susi	2
Jumlah		**8 orang**	

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari penelitian. Pengumpulan data yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Data yang diperoleh nantinya akan di evaluasi dengan keilmuan yang ada dalam prosesnya sebagai penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data adapun sumber data dari penelitian ini adalah ;

a. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis.Untuk observasi sudah beberapa kali di lakukan yaitu pada:

a. Kamis, 29 Desember 2022, mendatangi lokasi penelitian.
b. Kamis, 5 Januari 2023, ngantar surat observasi awal.
c. Rabu, 11 Januari 2023, mewawancarai informan.

b. Wawancara

Pengunaan metode ini untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait permasalahan dalam penelitian. Dimana peneliti bertemu langsung dengan informan dan responden untuk mendapatkan informasi secara lisan. Artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Pemerintah Daerah dan kepala bidang Rehabilitas Kota Jambi,wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

c. Dokumentasi

Dokumen penelitian merupakan dokumen yang berisi data untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti seringkali menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai salah satu sumber atau referensi. dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[13]

1.7.7 Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Bogdan dan Biklen Dalam buku Husaini Usman dkk, mendefenisikan analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkip, wawancara catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ditemukan. Data yang diperoleh baik dari data primer atau sekunder yang disusun, disajikan sertadianalisis menggunakan deskriptif kualitatif berupa penamparan yang akan dianalisis dan dinarasikan sesuai permasalahan yang ingin diangkat peneliti.[14]

1.7.8 Keabsahan/Triangulasi Data

Keabsahan data mencerminkan validitnya hasil data dan informasi yang dihasilkan. Keabsahan data menunjukkan bahwa semua informasi dan data diperoleh dari proses pengamatan dan keakuratan yang menjamin keakuratan informasi yang diberikan. Langkah -langkah ini diambil untuk menjamin dan memastikan bahwa data yang disajikan dapat diandalkan. Dalam validitas data, peneliti menggunakan beberapa mekanisme triangulasi, termasuk triangulasi

sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teoritis.

Dari beberapa dari mekanisme triangulasi diatas, peneliti menggunakan triangulasi Sumber untuk menguji keabsahan data, yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang di perloleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.30 Hal itu dapat di lakukan dengan Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kemudian, Membandingkan apa yang di katakan orang didepan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi. Selanjutnya, Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Lalu, Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat Dan Membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

[14]Husaini Usman dkk., Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 130.